

Katalog : 9302020.91



**2023**

**Volume 1, 2024**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**

**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**MENURUT PENGELUARAN**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**Katalog : 9302020.91**

<https://papuabarat.bps.go.id>

**2023**

**Volume 1, 2024**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
MENURUT PENGELUARAN**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT**

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI PAPUA BARAT DAYA MENURUT PENGELUARAN 2023**

Volume 1, 2024

Katalog : 9302020.91  
Nomor Publikasi : 91000.24009

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : xii + 65 hal

Penyusun Naskah:  
BPS Provinsi Papua Barat

Penyunting:  
BPS Provinsi Papua Barat

Pembuat Kover:  
BPS Provinsi Papua Barat

Penerbit:  
© BPS Provinsi Papua Barat

Dicetak Oleh:  
CV. Tintur Jaya

Sumber Ilustrasi:  
Freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Papua Barat

<https://papuabarat.bps.go.id>

## **Tim Penyusun**

# **Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran 2023**

Volume 1, 2024

Pengarah	: Ir. Merry, M.P.
Penanggung Jawab	: Citra Yanuar Widayanti, SST, M.Stat
Editor	: Citra Rizky Handayani, SST
Pengolah Data	: Fitrah Sarah Ramadhani, SST
Penulis	: Fitrah Sarah Ramadhani, SST
Penata Letak	: Fitrah Sarah Ramadhani, SST



# KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model - model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.



Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Manokwari, April 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Provinsi Papua Barat,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Merry', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ir. Merry, M.P.



# DAFTAR ISI

**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Daya  
Menurut Pengeluaran 2023  
Volume 1,2024**

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto .....	3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB .....	4
<b>BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	9
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	12
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	14
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	16
2.5. Perubahan Inventori .....	20
2.6. Ekspor Impor.....	23
<b>BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2023 .....</b>	<b>27</b>
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran....	29
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	34
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	38
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah .....	39
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	40
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori .....	41
3.7. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa .....	42
<b>BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 .....</b>	<b>43</b>
4.1. PDRB (Nominal) .....	45
4.2. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa.....	46
4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	47

	4.4. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB .....	47
	4.5. Perbandingan Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB .....	48
	4.6. Perbandingan PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa.....	49
	4.7. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan .....	49
	4.8. Neraca Perdagangan ( <i>Trade Balance</i> ) .....	50
	4.9. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) .....	50
BAB V	PENUTUP .....	53
LAMPIRAN	.....	57
DAFTAR PUSTAKA	.....	63

https://papuabarat.bps.go.id

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (miliar rupiah) .....	29
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (miliar rupiah) .....	30
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen) .....	31
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen) .....	32
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2019-2023 .....	33
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 .....	34
Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 (persen) .....	35
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 (persen) .....	36
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 (persen) .....	37
Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 .....	38
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 .....	39
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023.....	40
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 .....	42
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023.....	42
Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 .....	45
Tabel 16. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa, 2019-2023 .....	46
Tabel 17. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2019-2023....	47
Tabel 18. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 .....	48

Tabel 19.	Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB (ADHB), 2019-2023.....	48
Tabel 20.	Rasio PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023.....	49
Tabel 21.	Sisi Keseimbangan Penyediaan - Permintaan Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 .....	49
Tabel 22.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 .....	50
Tabel 23.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023.....	51

<https://papuabarat.bps.go.id>

# DAFTAR GAMBAR

## Halaman

Gambar 1. Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2023 (miliar rupiah).....	31
---	----

<https://papuabarat.bps.go.id>





# PENDAHULUAN





## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

#### a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

### **b. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

### **c. Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

## **1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB**

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sekto-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://papuabarat.bps.go.id>





# METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA





## 2. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

### 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

#### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

#### ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

#### iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*) sebagai berikut :

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Peralengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut :

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak karena mendapat keringanan (subsidi atau transfer).

2. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
3. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
4. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

1. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

#### iv. Penghitungan PKRT Tahunan

##### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

##### 2. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflasikan PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah—langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Estimasi PKRT hasil Susenas :
  - Makanan = Pengeluaran Konsumsi Perkapita Seminggu x (30/7) x 12 x Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun
  - Bukan Makanan = Pengeluaran Konsumsi Perkapita Sebulan x 12 x Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun
- b. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu; Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
- c. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP

- d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
- e. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
- f. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

### i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga. Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- c. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- d. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- e. Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

### iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

#### 1. Sumber Data

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP)

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- b. Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- c. Indeks Harga Konsumen (IHK)

#### 2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- $\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- $x_{ij}$  : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- $n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
- $i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
- $j$  : jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

b. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$X$  : PK-LNPRT adh Berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan mendeflasikan PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

## ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

## iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

## iv. Penghitungan PDRB Tahunan

### a. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)

- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

b. Metode Penghitungan

**PK-P Provinsi adh Berlaku**

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

<p><b>PK-P adh Berlaku =</b>  Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank  Indonesia</p>
---

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar ), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

**PK-P Provinsi adh Konstan**

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

**2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)**

**i. Pendahuluan**

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB erat kaitannya dengan aset tetap yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

## ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

## iii. Cakupan

**PMTB terdiri dari :**

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

## iv. Penghitungan PMTB Tahunan

### a. Sumber data

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/ Kab/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).

- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

#### b. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

- Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

- Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*Commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan*.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan mendeflasikan PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikasikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh Konstan* terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh Berlaku*, nilai PMTB *adh Konstan* tersebut di "reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB *adh Konstan* di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap. Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB *adh Konstan* adalah dengan cara mendeflasikan PMTB *adh Berlaku* dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB *adh Berlaku* untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan *adh Berlaku* dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB *adh Konstan* diperoleh dengan mendeflasikan nilai *adh Berlaku* dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan.

Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya. Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan mendeflasi nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI

### i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

### iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
8. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

##### a. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

##### b. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

##### Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflasikan stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflasikan perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

## **Pendekatan Tidak Langsung**

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflasikan nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

## **2.6 EKSPOR IMPOR**

### **i. Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### **ii. Konsep dan definisi**

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

### iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

#### Net Ekspor antar daerah

- Ekspor antar daerah
- Impor antar daerah

### iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

#### a. Sumber data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

#### b. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*).

Selain ekspor-impor luar negeri, PDB/PDRB menurut Pengeluaran juga mencatat ekspor-impor yang dilakukan antar wilayah dalam negeri. Ekspor dikurangi impor antar wilayah (antar provinsi) menghasilkan net ekspor antar wilayah. Bila net ekspor memiliki nilai positif, dapat dimaknai bahwa provinsi tersebut mengalami surplus perdagangan antar wilayah. Sebaliknya, bila net ekspor memiliki nilai negatif, dimaknai bahwa provinsi tersebut mengalami defisit perdagangan antar wilayah.

<https://papuabarat.bps.go.id>





**TINJAUAN PEREKONOMIAN  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
BERDASARKAN PDRB MENURUT  
PENGELUARAN TAHUN 2023**





### 3. TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2023

Provinsi Papua Barat Daya merupakan suatu Daerah Otonom Baru yang terbentuk meliputi 6 (enam) kabupaten/kota yang sebelumnya tercatat sebagai bagian dari Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat Daya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Desember 2022. Adapun Kabupaten/Kota yang menjadi cakupan pada Provinsi Papua Barat Daya antara lain: Kabupaten Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, Maybrat dan Kota Sorong.

Pembentukan struktur ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi yang digunakan dalam perekonomian, juga struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Papua Barat Daya digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

#### 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PAPUA BARAT DAYA MENURUT PENGELUARAN

Kondisi capaian ekonomi Papua Barat Daya pada tahun 2023 dapat digambarkan melalui nilai PDRB menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan 2010. PDRB menurut Pengeluaran dapat mengilustrasikan kinerja perekonomian wilayah menurut pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Daya menurut Pengeluaran, 2019-2023 (miliar rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	16.333,66
2. Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	461,31
3. Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	8.406,67
4. PMTB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	6.906,16
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-601,12
6. Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	23.254,51
7. Impor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	18.656,73
<b>Total PDRB</b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>36.104,47</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Nilai PDRB Papua Barat Daya (adh) Berlaku pada tahun 2023 menunjukkan kinerja ekonomi mencapai nilai sebesar 36.104,47 miliar rupiah. Nilai ini terbentuk dari adanya konsumsi akhir, baik dari rumah tangga, LNPRT maupun pemerintah, serta realisasi investasi yang terjadi, baik berbentuk investasi fisik (PMTB) maupun investasi lancar (perubahan inventori). Tidak hanya itu, pada tahun 2023 Provinsi Papua Barat Daya juga melakukan aktivitas perekonomian dengan wilayah lain yang tergambar dari adanya Ekspor dan Impor Barang dan Jasa, di mana nilai Ekspor tercatat lebih tinggi daripada Impor yang dilakukan Provinsi Papua Barat. Adapun kinerja masing-masing komponen dalam membentuk pdrb (adh) Berlaku tahun 2023 disajikan pada tabel 1.

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai dengan adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB tanpa ada pengaruh perubahan harga. PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2023 (miliar rupiah)**

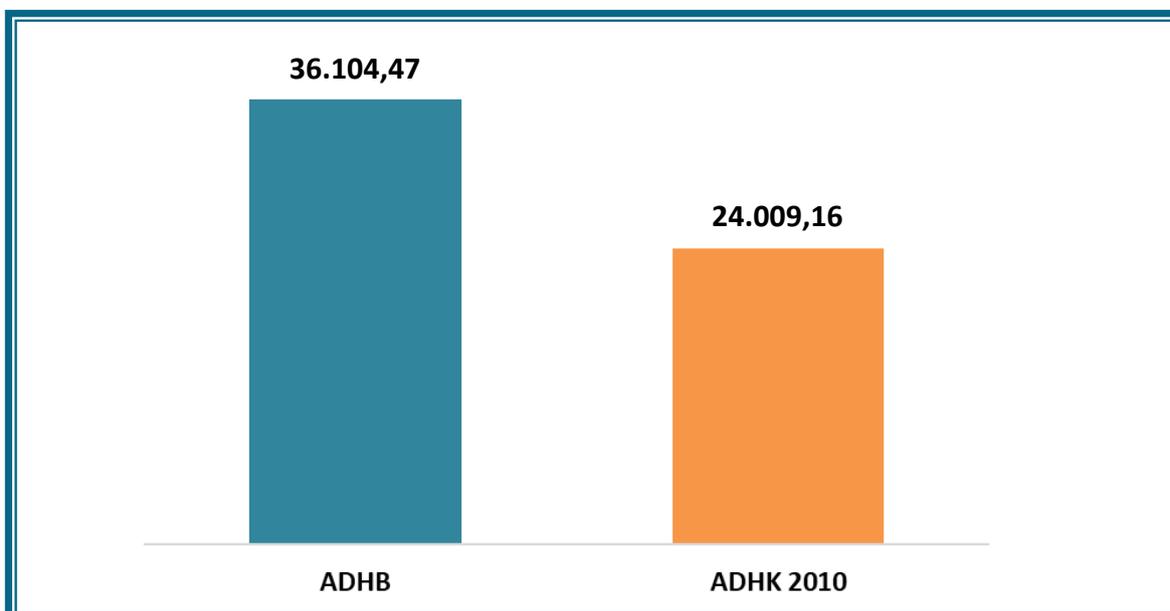
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	9.719,98
2. Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	258,87
3. Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	4.419,61
4. PMTB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	3.862,17
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-284,15
6. Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	19.513,68
7. Impor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	13.481,01
<b>Total PDRB</b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>24.009,16</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Bila dilihat atas dasar harga konstan 2010, Provinsi Papua Barat Daya tercatat menghasilkan PDRB senilai 24.009,16 miliar rupiah. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, komponen pengeluaran PDRB adh Konstan juga menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2023 terbentuk dari konsumsi akhir juga investasi yang direalisasikan di wilayah tersebut. Aktivitas ekonomi dengan wilayah lain juga memiliki peran dalam penyusunan PDRB menurut pengeluaran, di mana menurut harga konstan, Ekspor Barang dan Jasa juga tercatat memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Impor yang dilakukan pada tahun 2023.



**Gambar 1. Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2023\*\* (miliar rupiah)**

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Dari Gambar 1, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku memiliki nilai lebih besar daripada nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor dikurangi impor. Umumnya, jarak antara PDRB ADHB dan ADHK memiliki kecenderungan untuk makin melebar dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perubahan harga yang terjadi dari tahun ke tahun untuk PDRB di suatu wilayah, termasuk Provinsi Papua Barat Daya, akan cenderung berupa inflasi.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	45,24
2. Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	1,28
3. Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	23,28
4. PMTB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	19,13
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-1,66
6. Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	64,41
7. Impor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	51,67
<b>Total PDRB</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>100,00</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa pada tahun 2023, komponen ekspor barang dan jasa memiliki peran paling besar dalam PDRB Papua Barat Daya. Hal ini didorong oleh aktivitas ekspor hasil pertambangan minyak serta logam mulia dari wilayah Provinsi Papua Barat Daya ke wilayah lain di Indonesia.

Selanjutnya, proporsi konsumsi akhir rumah tangga juga cukup besar yaitu sekitar 45 persen di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peran rumah tangga untuk mendorong kinerja ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya sangat signifikan. Rumah tangga menjadi pasar yang menjanjikan untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan lapangan usaha di dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sebaliknya, kondisi ini juga dapat menjadi tantangan, apabila daya beli rumah tangga tidak dijaga dengan baik, maka perekonomian pun bisa terancam kestabilannya. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Provinsi Papua Barat Daya untuk mengawal daya beli rumah tangga serta penekanan untuk mengonsumsi produk yang dihasilkan dalam wilayah sehingga kestabilan ekonomi Provinsi Papua Barat Daya dapat senantiasa terjaga dalam kondisi baik.

Selanjutnya, konsumsi akhir pemerintah juga tercatat memiliki peran yang relatif besar dalam mendorong pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat Daya. Peran konsumsi akhir pemerintah tercatat mencapai 23 persen di tahun 2023. Kondisi ini menjelaskan bahwa perekonomian Provinsi Papua Barat Daya masih cukup bergantung pada realisasi anggaran pemerintah. Tentunya kebergantungan ini diharapkan makin mengecil seiring berjalannya waktu.

Dalam periode yang sama, komponen Impor juga mempunyai peran yang relatif besar pada pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. Sekitar 51 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk impor dari wilayah lain. Semakin besar peran impor memiliki dampak negatif terhadap pembentukan PDRB yang terbentuk di suatu daerah.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	2,74
2. Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	9,77
3. Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	11,59
4. PMTB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-2,76
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	5,07
7. Impor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	10,20
<b>Total PDRB</b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>1,82</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya pada tahun 2023 mencapai 1,82 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan kinerja ekonomi yang terjadi di tahun 2022. Perbaikan kinerja ekonomi didorong oleh tumbuhnya seluruh komponen PDRB menurut Pengeluaran, kecuali PMTB di tahun 2023.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Provinsi Papua Barat Daya Menurut Pengeluaran, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	168,04
2. Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	178,20
3. Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	190,21
4. PMTB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	178,82
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	211,55
6. Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	119,17
7. Impor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	138,39
<b>Total PDRB</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>150,38</b>

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Indikator Agregat turunan PDRB yang menggambarkan perekonomian wilayah selanjutnya adalah Indeks Implisit PDRB. Indeks implisit PDRB menurut Pengeluaran merupakan indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) dibandingkan dengan tahun dasar (tahun 2010). Indeks implisit dari hampir seluruh komponen pembentuk PDRB menurut Pengeluaran Papua Barat Daya menunjukkan terdapat peningkatan harga dibandingkan kondisi di tahun 2010 (nilai indeks lebih dari 100).

Pada tahun 2023, komponen konsumsi akhir rumah tangga tercatat memiliki indeks implisit sebesar 168,04. Nilai ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir rumah tangga di Provinsi Papua Barat Daya, yang pada tahun 2023 tercatat mengalami kenaikan harga sekitar 68 persen lebih tinggi dibandingkan harga kondisi tahun 2010.

Interpretasi senada juga bisa dilihat pada komponen konsumsi akhir pemerintah yang tercatat memiliki indeks implisit sebesar 190,21. Indeks tersebut menunjukkan bahwa barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir pemerintah di Provinsi Papua Barat Daya, yang pada tahun 2023 tercatat mengalami kenaikan harga sekitar 90 persen lebih tinggi dibandingkan harga kondisi tahun 2010.

### 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran Papua Barat Daya tahun 2023. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana lebih dari hampir separuh produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (miliar rupiah)					
a. ADHB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	16.333,66
b. ADHK 2010	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	9.719,98
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	45,24
Rata-rata konsumsi per kapita/ tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	26.442,83
b. ADHK 2010	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	15.735,84
Pertumbuhan (persen)					
a. Total Konsumsi RT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	1,16
b. Per Kapita	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	1,15
Jumlah Penduduk (jiwa)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	617.697

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Tabel 6. menunjukkan bahwa pada tahun 2023, konsumsi akhir rumah tangga atas dasar harga berlaku di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 16.333,66 miliar rupiah. Sementara itu, bila dilihat atas dasar harga konstan 2010, konsumsi rumah tangga tercatat senilai 9.719,98 miliar rupiah. Nilai ini cukup besar sehingga proporsi konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2023 mencapai 45,24 persen.

Tingginya konsumsi akhir rumah tangga, tentu tidak lepas dari jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat Daya sendiri. Umumnya, jumlah penduduk di suatu wilayah cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga di wilayah tersebut, dengan catatan bahwa daya beli rumah tangga harus dijaga kestabilannya sehingga masyarakat mampu menjaga konsumsi akhir yang dilakukannya.

Tingginya nilai konsumsi akhir rumah tangga di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2023 juga dapat didukung oleh makin beragam karakteristik barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah tersebut. Salah satunya dapat disebabkan oleh perkembangan teknologi saat ini semakin memudahkan masyarakat untuk membeli barang dan jasa secara *online*, serta fasilitas transportasi dan pengiriman barang yang variatif dan semakin murah. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai kebutuhannya dengan lebih baik.

Tidak hanya analisis secara total, konsumsi akhir rumah tangga juga dapat dianalisis dari sisi per kapita. Konsumsi akhir rumah tangga per kapita merupakan nilai rata-rata konsumsi akhir rumah tangga dari setiap penduduk di suatu wilayah. Adapun pada tahun 2023, Provinsi Papua Barat Daya tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 617.697 jiwa. Dengan demikian, konsumsi akhir rumah tangga per kapita Provinsi Papua Barat Daya atas dasar harga berlaku dapat dihitung dan tercatat mencapai nilai 26.442,83 ribu rupiah setahun. Sementara itu, bila dilihat atas dasar harga konstan 2010, konsumsi akhir rumah tangga per kapita mencapai 15.735,84 ribu rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2023, di Provinsi Papua Barat Daya secara rata-rata per kapita menghabiskan sekitar 26.442,83 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Bila dihitung konsumsi akhir per kapita per bulan, maka di tahun 2023, konsumsi akhir rumah tangga per kapita per bulan mencapai nilai sebesar 2.203,57 ribu rupiah.

Konsumsi akhir rumah tangga Provinsi Papua Barat Daya secara total mengalami pertumbuhan sebesar 1,16 persen. Sementara itu, bila dilihat secara per kapita, konsumsi akhir rumah tangga tumbuh sebesar 1,15 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja konsumsi akhir rumah tangga Provinsi Papua Barat Daya di 2023 dibandingkan kinerjanya di tahun 2022.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1	1	1	1	56,01
b. Pakaian dan Alas Kaki	1	1	1	1	1,62
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1	1	1	1	11,44
d. Kesehatan & Pendidikan	1	1	1	1	5,92
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1	1	1	1	17,13
f. Hotel & Restoran	1	1	1	1	3,41
g. Lainnya	1	1	1	1	4,46
<b>Total Konsumsi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Secara umum, struktur konsumsi akhir rumah tangga Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 untuk konsumsi makanan, minuman, dan rokok lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan, minuman, dan rokok lebih dari separuh konsumsi rumah tangga, yakni mencapai 56 persen.

Bila ditilik lebih jauh mengenai konsumsi bukan makanan didominasi oleh konsumsi untuk kebutuhan Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya mencapai 17 persen pada tahun 2023. Konsumsi bukan makanan juga didominasi untuk barang dan jasa pada kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga yang mencapai 11 persen di tahun 2023.

Berdasarkan pola proporsi konsumsi diatas, terlihat adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sehingga, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
d. Kesehatan & Pendidikan	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
f. Hotel & Restoran	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
g. Lainnya	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
<b>Total Konsumsi</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, seluruh kelompok konsumsi pada pengeluaran rumah tangga di Provinsi Papua Barat Daya tercatat mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke

waktu. Oleh karena itu, seluruh kelompok pengeluaran rumah tangga yang mengalami pertumbuhan positif di tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga pada seluruh kelompok barang dan jasa dibandingkan tahun 2022.

Kelompok barang dengan pertumbuhan konsumsi paling tinggi adalah kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga yang mencapai 7,15 persen. Selanjutnya, kelompok konsumsi Hotel dan Resto; serta Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya juga mengalami pertumbuhan relatif tinggi, berturut-turut mencapai 5,46 persen, serta 5,05 persen di tahun 2023. Kelompok konsumsi Kesehatan dan Pendidikan tercatat mengalami pertumbuhan yang paling kecil, yakni hanya mencapai 0,21 persen di tahun 2023.

**Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-1	-1	-1	-1	3,02
b. Pakaian dan Alas Kaki	-1	-1	-1	-1	3,66
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-1	-1	-1	-1	3,71
d. Kesehatan & Pendidikan	-1	-1	-1	-1	1,49
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-1	-1	-1	-1	1,23
f. Hotel & Restoran	-1	-1	-1	-1	4,13
g. Lainnya	-1	-1	-1	-1	0,36
<b>Total Konsumsi</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>2,44</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Perkembangan harga pada kelompok konsumsi rumah tangga dapat diilustrasikan oleh pertumbuhan indeks implisit masing-masing kelompok konsumsi. Bila pertumbuhan indeks implisit bernilai positif, menandakan adanya kenaikan harga pada barang dan jasa yang dikonsumsi dibandingkan harga di tahun lalu. Sebaliknya, bila pertumbuhan indeks implisit bernilai negatif, maka diartikan sebagai adanya penurunan harga kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi dibandingkan dengan harga di tahun lalu.

Pada tahun 2023, secara umum barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga di Provinsi Papua Barat Daya mengalami kenaikan harga hingga 2,44 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini dipicu oleh terjadinya kenaikan harga di seluruh kelompok konsumsi rumah tangga, baik kelompok makanan maupun bukan makanan.

Kelompok makanan, minuman, dan rokok yang dikonsumsi rumah tangga di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2023 tercatat mengalami kenaikan harga sebesar 3,02 persen. Di sisi lain, kelompok barang dan jasa non makanan juga seluruhnya mengalami kenaikan harga di kisaran 0,36 persen hingga 4,13 persen. Kelompok barang dan jasa non makanan yang mengalami kenaikan harga tertinggi pada tahun 2023 adalah Hotel dan Restoran. Pembatasan sosial akibat dari merebaknya virus Covid-19 tahun 2020 hingga 2022 di Indonesia menyebabkan anjloknya harga pada kelompok konsumsi Hotel dan Restoran. Seiring berakhirnya masa pandemi tersebut, ditengarai menjadi sebab harga-harga pada kelompok Hotel dan Restoran berangsur pulih dan mengalami kenaikan harga cukup tinggi di tahun 2023.

### 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (LNPRT)

Peran konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana dilihat dari proporsinya terhadap PDRB tidak terlalu besar dibandingkan dengan komponen penyusun PDRB lainnya.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Papua Barat Daya, 2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (miliar rupiah)					
a. ADHB	1	1	1	1	461,31
b. ADHK 2010	1	1	1	1	258,87
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1	1	1	1	1,28
Pertumbuhan (persen)	1	1	1	1	9,77

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Pada tahun 2023, konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga berlaku tercatat mencapai 461,31 miliar rupiah, sementara konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga konstan 2010 mencapai nilai 258,87 miliar rupiah. Dengan nilai tersebut, konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2023 memberi sumbangsih sebesar 1,28 persen terhadap pembentukan PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Papua Barat Daya. Meskipun demikian, kinerja konsumsi akhir LNPRT mengalami pertumbuhan cukup fantastis sebesar 9,77 persen dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2022. Kinerja ini diduga didorong kuat oleh segala kegiatan persiapan menyambut Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada awal tahun 2024.

### 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Papua Barat Daya akan dijelaskan pada uraian di bawah ini.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Konsumsi Pemerintah (miliar rupiah)</b>					
a. ADHB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	8.406,67
b. ADHK 2010	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	4.419,61
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	23,28
<b>Konsumsi Pemerintah per kapita/ tahun (ribu rupiah)</b>					
a. ADHB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	13.609,71
b. ADHK 2010	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	7.154,99
<b>Pertumbuhan (persen)</b>					
a. Total Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	11,59
b. Per Kapita	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	9,86
Jumlah Penduduk (jiwa)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	617.697

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Secara umum, total konsumsi akhir pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 8.406,67 miliar rupiah. Sementara bila dilihat atas dasar harga konstan 2010, nilainya mencapai 4.419,61 miliar rupiah. Konsumsi akhir pemerintah tercatat memiliki peran dalam pembentukan PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Papua Barat Daya hingga lebih dari 23 persen di tahun 2023. Peranan tersebut dapat dikatakan cukup besar terhadap PDRB Provinsi Papua Barat Daya secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 memiliki kecenderungan untuk cukup bergantung pada konsumsi akhir pemerintah, yang notabene adalah realisasi belanja anggaran pemerintah. Untuk meraih perekonomian wilayah yang lebih sehat, kebergantungan ekonomi dari anggaran pemerintah perlu ditekan sekaligus menggenjot peran swasta. Berkurangnya kebergantungan perekonomian wilayah atas konsumsi akhir pemerintah akan tercermin dari peran konsumsi akhir pemerintah atas PDRB yang makin kecil dari waktu ke waktu.

Selain dianalisis secara total, konsumsi akhir pemerintah juga dapat dianalisis dari sisi konsumsi akhir pemerintah per kapita. Nilai ini menunjukkan rata-rata konsumsi akhir pemerintah yang dirasakan tiap penduduk di suatu wilayah. Pada

tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebanyak 617.697 jiwa. Jika dihitung per kapita, konsumsi akhir pemerintah per kapita Provinsi Papua Barat Daya atas dasar harga berlaku mencapai 13.609,71 ribu rupiah per tahun. Sementara itu, nilainya atas dasar harga konstan 2010 mencapai 7.154,99 ribu rupiah per tahun.

Perkembangan konsumsi akhir pemerintah secara “riil” dapat dijelaskan oleh pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah. Pada tahun 2023, baik konsumsi akhir pemerintah total maupun konsumsi akhir pemerintah per kapita Provinsi Papua Barat Daya tercatat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah yang bernilai positif pada kedua indikator tersebut. Konsumsi akhir pemerintah total tumbuh sebesar 11,59 persen, sedangkan konsumsi akhir pemerintah per kapita tumbuh sebesar 9,86 persen.

### 3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total PMTB (miliar rupiah)</b>					
a. ADHB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	6.906,16
b. ADHK 2010	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	3.862,17
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	19,13
<b>Struktur PMTB (miliar rupiah)</b>					
a. Bangunan	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	5.212,70
(%)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	75,48
b. Non Bangunan	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	1.693,46
(%)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	24,52
c. Total PMTB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	6.906,16
(%)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	100,00

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Nilai PMTB Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 atas dasar harga berlaku tercatat mencapai nilai 6.906,16 miliar rupiah. Sementara itu, bila dilihat atas dasar harga konstan 2010, PMTB mencapai 3.862,17 miliar rupiah. Nilai tersebut membuat peranan PMTB atas PDRB menurut Pengeluaran mencapai 19,13 persen di tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa realisasi investasi fisik, seperti bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya, di Provinsi Papua Barat Daya masih cukup besar hingga tahun 2023.

PMTB dapat dibedakan menjadi PMTB berbentuk bangunan dan non bangunan. Adapun PMTB yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 tercatat didominasi oleh PMTB berbentuk bangunan. Nilai PMTB Bangunan mencapai 75,48 persen dari keseluruhan PMTB yang ada, atau senilai 5.212,70 miliar rupiah. Di sisi lain, PMTB Non Bangunan tercatat sebesar 24,52 persen dari keseluruhan PMTB di Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023, senilai 1.693,46 miliar rupiah. Didominasinya PMTB berbentuk bangunan di Provinsi Papua Barat Daya dinilai cukup wajar mengingat wilayah di provinsi ini masih didominasi oleh bentangan alam yang belum tersentuh. Oleh karena itu diperlukan suntikan investasi fisik yang cukup besar seperti jalan dan jembatan untuk menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain, serta investasi berbentuk bangunan, seperti pabrik, ruko, dan bangunan lainnya sebagai tempat dilakukannya kegiatan perekonomian.

### **3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI**

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan.

Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok). Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Perubahan Inventori (miliar rupiah)					
a. ADHB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-601,12
b. ADHK 2010	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-284,15
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-1,66

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Pada tahun 2023 perubahan inventori atas dasar harga berlaku tercatat mencapai nilai -601,12 miliar rupiah. Sementara itu perubahan inventori atas dasar harga konstan 2010 mencapai nilai -284,15 persen. Nilai perubahan tersebut menghasilkan proporsi terhadap PDRB sebesar -1,66 persen. Perubahan Inventori Provinsi Papua Barat tahun 2023 yang bernilai negatif menunjukkan posisi inventori di Desember 2023 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan posisi inventori di awal tahun. Kondisi ini dapat terjadi bila permintaan lebih besar dari produksi yang dihasilkan sepanjang tahun 2023, sehingga permintaan tersebut perlu dipenuhi dengan mengambil inventori yang ada.

### 3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Net ekspor barang dan jasa merupakan komponen penyusun PDRB menurut Pengeluaran yang dihitung dengan cara mengurangkan nilai Ekspor atas nilai Impor yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya. Nilai Ekspor yang dimaksud pada bagian ini mencakup nilai Ekspor Luar Negeri juga Ekspor antar daerah Provinsi Papua Barat Daya. Sementara itu, Nilai Impor yang dimaksud pada bagian ini mencakup nilai Impor Luar Negeri juga Ekspor antar daerah Provinsi Papua Barat Daya.

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor Barang dan Jasa (miliar rupiah)					
a. ADHB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	4.597,78
b. ADHK 2010	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	6.032,67
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	12,73

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat



**IV**

**PERKEMBANGAN AGREGAT  
PDRB MENURUT PENGELUARAN  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
TAHUN 2023**





#### 4. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

##### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

**Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
a. ADHB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	36.104,47
b. ADHK 2010	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	24.009,16
PDRB per kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	58.450,13
b. ADHK 2010	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	38.868,83
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (persen)					0,24
Perkembangan Penduduk					
Jumlah Penduduk (jiwa)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	617.697
Pertumbuhan Penduduk	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	1,58

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 36.104,47 miliar rupiah. Bila dilihat atas dasar harga konstan mencapai 24.009,16 miliar rupiah.

PDRB menurut Pengeluaran secara total menjelaskan pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam perekonomian wilayah. PDRB menurut Pengeluaran seringkali dijadikan pendekatan untuk melihat kesejahteraan, di mana tingginya PDRB menurut Pengeluaran di suatu wilayah seharusnya

membuat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut semakin baik. Oleh karena itu, terdapat indikator turunan dari PDRB yang disebut sebagai PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita diartikan sebagai rata-rata pengeluaran dari setiap penduduk di wilayah tersebut per tahun. Makin besar nilai PDRB per kapita, secara kasar mengindikasikan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut makin baik.

Provinsi Papua Barat Daya tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 617.697 jiwa di tahun 2023. Bila membagi PDRB total dengan jumlah penduduk tersebut, pada tahun 2023 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai nilai 58.450,13 ribu rupiah per tahun, sementara atas dasar harga konstan 2010, mencapai 38.868,83 ribu rupiah per tahun.

#### 4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR BARANG DAN JASA

Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi sekitar 45 persen terhadap PDRB Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 45 persen dari produk yang dihasilkan di Provinsi Papua Barat Daya maupun produk yang diimpor dari luar, digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Di sisi lain, ekspor barang dan jasa juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi, sekitar 64 persen.

Indikator ini membandingkan produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor ke luar wilayah. Bila nilai perbandingan kurang dari 1 (satu), dapat diartikan bahwa barang dan jasa di wilayah Provinsi Papua Barat Daya lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor daripada digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Bila nilai perbandingan sama dengan 1 (satu), dapat diartikan bahwa barang dan jasa di wilayah Provinsi Papua Barat Daya sama banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan konsumsi akhir rumah tangga. Sementara bila nilai perbandingan lebih dari 1 (satu), dapat diartikan bahwa barang dan jasa di wilayah Provinsi Papua Barat Daya lebih banyak digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga daripada digunakan untuk kebutuhan ekspor.

**Tabel 16. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (miliar rupiah)	_1	_1	_1	_1	16.333,66
Total Ekspor Barang dan Jasa ADHB (miliar rupiah)	_1	_1	_1	_1	23.254,51
<b>Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor</b>	<b>_1</b>	<b>_1</b>	<b>_1</b>	<b>_1</b>	<b>0,70</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Data pada tabel 16 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 0,70 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik lebih banyak diserap untuk memenuhi permintaan ekspor.

#### 4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Indikator ini membandingkan produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang menjadi investasi fisik (PMTB) yang dilakukan di suatu wilayah. Bila nilai perbandingan kurang dari 1 (satu), dapat diartikan bahwa barang dan jasa di wilayah Provinsi Papua Barat Daya lebih banyak digunakan menjadi investasi fisik daripada digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Bila nilai perbandingan sama dengan 1 (satu), dapat diartikan bahwa barang dan jasa di wilayah Provinsi Papua Barat Daya sama banyak digunakan untuk menjadi investasi fisik maupun konsumsi akhir rumah tangga. Sementara bila nilai perbandingan lebih dari 1 (satu), dapat diartikan bahwa barang dan jasa di wilayah Provinsi Papua Barat lebih banyak digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga daripada digunakan untuk menjadi investasi fisik.

**Tabel 17. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (miliar rupiah)	_1	_1	_1	_1	16.333,66
Total PMTB ADHB (miliar rupiah)	_1	_1	_1	_1	6.906,16
<b>Perbandingan Konsumsi Rumah tangga terhadap PMTB</b>	<b>_1</b>	<b>_1</b>	<b>_1</b>	<b>_1</b>	<b>2,36</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Pada tahun 2023, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 2,36 kali dari nilai PMTB. Hal ini berarti bahwa sebagian besar barang dan jasa lebih banyak diserap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga daripada dijadikan investasi fisik.

#### 4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 18. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)
<b>Konsumsi Akhir ADHB (miliar rupiah)</b>					
a. Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	16 333,66
b. LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	461,31
c. Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	8 406,67
<b>Jumlah</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	25 201,64
<b>PDRB ADHB (miliar rupiah)</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>36 104,47</b>
<b>Proporsi</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>0,70</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Pada tahun 2023, total konsumsi akhir di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 25.201,64 miliar rupiah. Perbandingan antara konsumsi akhir dengan total PDRB Provinsi Papua Barat Daya mencapai 0,70 poin. Nilai ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang berada di wilayah domestik, baik berasal dari produksi di dalam wilayah maupun diimpor dari luar, yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir.

#### 4.5 PERBANDINGAN EKSPOR BARANG DAN JASA TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar daerah. Sementara PMTB menunjukkan produk yang menjadi aset tetap atau investasi fisik di daerah. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 19. Rasio Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Barang dan Jasa ADHB (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	23.254,51
Total PMTB ADHB (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	6.906,16
<b>Perbandingan Ekspor Barang dan</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>3,37</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Pada tahun 2023, perbandingan antara ekspor barang dan jasa terhadap PMTB di Provinsi Papua Barat Daya tercatat mencapai 3,37 poin. Hal ini menunjukkan bahwa besaran ekspor barang dan jasa mencapai lebih dari 3 (tiga) kali lipat realisasi investasi fisik yang dilakukan Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2023.

#### 4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR BARANG DAN JASA

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor baik dari luar negeri maupun luar provinsi di dalam negeri. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 20. Rasio PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat Daya, 2019- 2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PDRB ADHB (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	36 104,47
Total Impor ADHB (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	18 656,73
<b>Perbandingan PDRB terhadap Impor</b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>1,94</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Perbandingan PDRB Provinsi Papua Barat Daya terhadap impor barang dan jasa tahun 2023 tercatat sebesar 1,94 poin. Nilai perbandingan ini menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Papua Barat Daya bernilai lebih besar daripada impornya. Semakin besar nilai perbandingan, mengindikasikan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya tidak begitu bergantung pada penyediaan barang dan jasa yang berasal dari luar wilayahnya.

#### 4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 21. Sisi Keseimbangan Penyediaan - Permintaan Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Penyediaan</b>					
a. PDRB ADHB (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	36.104,47
(%)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	65,93
b. Impor BJ ADHB (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	18.656,73
(%)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	34,07
<b>Total Permintaan Akhir</b>					
Permintaan Akhir (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	54.761,20
(%)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	100,00

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Dari tabel 21, tersaji bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah. Proporsi pemenuhan permintaan akhir domestik yang berasal dari impor mencapai 34 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 66 persen dari selisih hasil produksi domestik.

#### 4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor barang dan jasa terhadap nilai impor barang dan jasa disebut sebagai “Ekspor Neto”. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran pembayaran masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran pembayaran keluar.

Apabila perbandingan ekspor terhadap impor lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 22. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Barang dan Jasa ADHB (miliar rupiah)	_1	_1	_1	_1	23.254,51
Total Impor Barang dan Jasa ADHB (miliar rupiah)	_1	_1	_1	_1	18.656,73
Net Ekspor Barang dan Jasa (X - M) ADHB (miliar rupiah)	_1	_1	_1	_1	4.597,78
<b>Perbandingan Ekspor Barang dan Jasa terhadap Impor Barang dan Jasa</b>	<b>_1</b>	<b>_1</b>	<b>_1</b>	<b>_1</b>	<b>1,25</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

Pada tahun 2023, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Papua Barat Daya menunjukkan nilai lebih dari 1. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Papua Barat Daya berada dalam posisi surplus.

#### 4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan

secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi), dalam hal ini digambarkan parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Keterangan :

$I_t$  = PMTB tahun ke t  
 $Y_t$  = Output tahun ke t  
 $Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

Nilai ICOR Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 sebesar 9,01. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan investasi dalam mendorong PDRB Provinsi Papua Barat Daya sangat signifikan. Secara rata-rata, penambahan satu satuan investasi dapat meningkatkan PDRB sebanyak 9 satuan. Dengan demikian, menjaga iklim berinvestasi senantiasa stabil dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan PDRB Provinsi Papua Barat Daya.

**Tabel 23. Incremental Capital Output Ratio Provinsi Papua Barat Daya, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	24.009,16
Perubahan PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	428,80
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	3.862,17
<b>ICOR</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>9,01</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat





**PENUTUP**

<https://papuabarat.bps.go.id>





## 5. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan dalam publikasi ini sebagai berikut:

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2023 dapat menggambarkan struktur dan kinerja perekonomian Provinsi Papua Barat Daya pada tahun tersebut. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR), pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data PDRB menurut Pengeluaran secara rutin akan disusun dan disajikan dalam format publikasi secara tahunan. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Papua Barat Daya terhadap ekonomi wilayah lain (*rest of the world*).





# LAMPIRAN





**Lampiran 1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Papua Barat Daya 2019-2023 (miliar rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	16.333,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	461,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	8.406,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	6.906,16
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-601,12
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	4.597,78
<b>PDRB</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>36.104,47</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

**Lampiran 2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Papua Barat Daya 2019-2023 (miliar rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	9.719,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	258,87
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	4.419,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	3.862,17
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-284,15
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	6.032,67
<b>PDRB</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>24.009,16</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Papua Barat Daya 2019-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	45,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	1,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	23,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	19,13
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-1,66
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	12,73
<b>PDRB</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>100,00</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Papua Barat Daya 2019-2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	2,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	9,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	11,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-2,76
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-
<b>PDRB</b>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	<b>1,82</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

## Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Papua Barat Daya 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	168,04
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	178,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	190,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	178,82
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	211,55
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	76,21
<b>PDRB</b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>150,38</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat

## Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Papua Barat Daya 2019-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	2,44
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	6,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	0,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	0,04
5. Perubahan Inventori	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	- <sup>1</sup>	-
<b>PDRB</b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>-<sup>1</sup></b>	<b>1,47</b>

Catatan : \*\*= Angka sangat sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

<sup>1</sup> Sebelum 2023, merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat





# DAFTAR PUSTAKA





1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Statistik Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. \_\_\_\_\_, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
6. \_\_\_\_\_, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
7. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
9. \_\_\_\_\_, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
10. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
11. \_\_\_\_\_, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
12. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
13. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
14. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
15. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
16. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
17. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
18. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
19. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
20. \_\_\_\_\_, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
21. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
22. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.





**SI 2023**

**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jln. Trikora Sowi IV No.99 Manokwari 98315  
Telp. 0986-2210047; Email : [bps9100@bps.go.id](mailto:bps9100@bps.go.id)  
Homepage: <http://papuabarat.bps.go.id>